

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan daerah telah mengalami reformasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa: "Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik

Ketika dimulainya otonomi daerah, harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun melakukan pembangunan diberbagai bidang di daerah masing-masing, karena setiap daerah diberikan kebebasan mutlak oleh pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya. Oleh karena itu daerah juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan daerah selain mampu memberikan penilaian prestasi kerja pemerintah, jugamampu menyediakan informasi sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, sehingga laporan keuangan yang dimaksud mampu meningkatkan kredibilitasnya dan pada akhirnya akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Maka daripada itu, ditetapkanlah peraturan sebagai pedoman yang mampu mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, selain untuk mewujudkan *good governance* juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari berbagai tulisan pada artikel atau jurnal yang menulis tentang akuntansi keuangan daerah, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai (BPK, 2006), berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (*timeliness*).

Dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bagian Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan,

salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang digunakan untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting, karena sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan kemampuan manusia untuk menjalankan sistem yang ada.

Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan. Walaupun secara

umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing , namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada, tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal, faktor ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

Winidyaningrum (2010) meneliti pengaruh sumber daya manusia dan informasi teknologi pemanfaatan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian internal akuntansi. Hasil penelitiannya menyatakan Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatan waktu.

Penelitian Alimbudiono dan fidelis (2004) memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di subbagian akuntansi pemerintah

xyz masih minim, job diskription-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan.

Mengingat bahwa ketepatan waktu merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, peneliti tertarik untuk meneliti hal apa saja yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah “ **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan waktu dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi)**”.



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi identifikasi pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Akuntansi mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi?
3. Apakah Teknologi Informasi mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi?
4. Sejauh mana pengaruh Penggunaan teknologi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemko Tebing Tinggi?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman terhadap permasalahan yang akan di teliti, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu penulis membatasi masalah hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern Akuntansi, Teknologi Informasi, mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi?
2. Apakah Sumber Daya Manusia mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Akuntansi mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi?
4. Apakah Teknologi Informasi mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Intern Akuntansi terhadap ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi.

3. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Teknologi Informasi terhadap ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi.

1.6 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, Penulis berharap mendapat gambaran yang lebih jelas antara teori dan praktek yang sebenarnya terjadi dalam instansi dan tentunya sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal proses penyusunan laporan keuangan.
2. Bagi aktivitas akademis, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan penambah wawasan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Instansi, Sebagai informasi tambahan atau masukan pada Pemko Tebing Tinggi atas apa yang telah dilakukan selama ini khususnya mengenai masalah ketepatan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.